



**LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR: 16 TAHUN 2024  
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025**

**RENCANA KERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
TAHUN 2025**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PAYAKUMBUH  
2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Payakumbuh Tahun 2025.

Rencana Kerja (RENJA) ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023, capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kota Payakumbuh.

Kami menyadari dokumen ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Harapan kami Rencana Kerja DPMPTSP Kota Payakumbuh Tahun 2025 ini dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kota Payakumbuh, yang pada akhirnya diharapkan dapat menunjang tercapainya Tujuan Kota Payakumbuh.

Payakumbuh, 1 Agustus 2024



Kepala DPMPTSP Kota Payakumbuh

**MEIZON SATRIA, ST, M.Si**

NIP. 19710503 200312 1 006

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	li
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud Dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun lalu dan Capaian Renstra DPMPTSP	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMTSP Tahun 2023	20
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi DPMPTSP	22
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Akhir RKPD	25
2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan masyarakat	35
BAB III. TUJUAN SASARAN DPMPTSP	38
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	38
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD	38
3.3 Program Dan Kegiatan	38
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP	47
Rencana Program dan kegiatan Prioritas Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025	47
BAB V. PENUTUP	66
LAMPIRAN	67

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja (Renja) Dpmptsp Tahun Anggaran 2022 ..	14
Tabel 2 Kinerja Pelayanan DPMPSTSP Kota Payakumbuh Tahun 2022 .....	28
Tabel 3 Review Terhadap Rancangan Awal Rkpd Tahun 2024 .....	33
Tabel 4.a Persandingan Daftar Kegiatan Prioritas Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2023 Dengan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 .....	41
Tabel 4.b Usulan Program Dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 .....	42
Tabel 5 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Payakumbuh.....	44
Tabel 6 Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintukota Payakumbuh Tahun 2024.....	54

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan daerah yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada tingkatan OPD dilakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang dinamakan Rencana Kerja (Renja) - OPD, sebagai langkah strategis untuk mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang diinginkan dalam perencanaan jangka menengah.

Rencana Kerja OPD ini menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Tujuan Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga **penyusunan** Renja OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD.

Rencana Kerja memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dalam Rencana Kerja terdapat penjelasan tentang Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2023, peningkatan pelayanan OPD, target pencapaian kinerja serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan operasional yang meliputi ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan renja OPD adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  13. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 3);
  14. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
  15. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);

16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 Nomor 8);
18. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 Nomor 15);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

**Maksud** penyusunan Rencana Kerja DPMPSTSP Kota Payakumbuh Tahun 2025 adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalkan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif

**Tujuan** penyusunan Rencana Kerja DPMPSTSP Kota Payakumbuh Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah serta sebagai pedoman taktis dan strategis dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu selama 1 (satu) tahun ke depan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) DPMPSTSP Kota Payakumbuh Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan penyajian sebagai berikut :

## **BAB. I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

**BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun lalu dan Capaian Renstra DPMPTSP
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB. III TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP
- 3.3. Program dan Kegiatan

**BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP**

**BAB. V PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat daerah**

Program dan Kegiatan pada DPMPTSP untuk Tahun 2023 terdiri atas 6 program, 14 kegiatan dan 31 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.394.265.284,-. Seluruh kegiatan telah terlaksana dengan baik. dengan realisasi keuangan sebesar RP. 4.877.028.367,- atau 90,41 %. Dengan perincian sebagai berikut :

##### **a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai Evaluasi AKIP DPMPTSP oleh Inspektorat, dengan target kinerja dan realisasi pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Nilai IKM, target 96,63 dan realisasi 97,59 dengan capaian kinerja 100,99%.
- Nilai Evaluasi AKIP DPMPTSP oleh Inspektorat, target A dan realisasi A, dengan capaian kinerja 100%.

Yang didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan dengan 20 (dua puluh tiga) sub kegiatan yaitu:

##### **1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

###### **1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

Dengan indikator kinerja Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah, target sebanyak 3 dokumen dan terealisasi sebanyak 3 dokumen dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.499.850,- dan terealisasi sebesar Rp. 21.488.140,- atau 99,95%.

###### **1.2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Dengan indikator kinerja Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah, target sebanyak 4 dokumen dan terealisasi sebanyak 4 dokumen dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.929.400,- atau 99,53%.

##### **2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

###### **2.1. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

Dengan indikator kinerja Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN, target sebanyak 21 orang dan terealisasi sebanyak 21 orang dengan capaian

100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.551.933.998,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.166.392.009,- atau 84,89%.

## 2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, target sebanyak 20 orang dan terealisasi sebanyak 20 laporan dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 186.606.608,- dan terealisasi sebesar Rp. 185.303.000,- atau 99,30%.

## 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

### 3.1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Dengan indikator kinerja Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan, target sebanyak 57 stel dan terealisasi sebanyak 57 stel dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.285.240,- dan terealisasi sebesar Rp. 30.267.000,- atau 99,94%.

## 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

### 4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Dengan indikator kinerja Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan, target sebanyak 11 jenis dan terealisasi sebanyak 11 jenis dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.999.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.607.120,- atau 97,38%.

### 4.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Dengan indikator kinerja Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan, target sebanyak 7 paket dan terealisasi sebanyak 7 paket dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 33.019.770,- dan terealisasi sebesar Rp. 32.725.000,- atau 99,11%.

### 4.3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Dengan indikator kinerja Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan, target 11 jenis dan terealisasi sebesar 11 jenis dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 32.808.970,- dan terealisasi sebesar Rp. 30.895.350,- atau 94,17%.

### 4.4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Dengan indikator kinerja Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan, target sebanyak : biaya cetak target 7 jenis terealisasi 7 jenis,

pembuatan bendera merah putih target 1 buah terealisasi 1 buah, foto copy target 23.039 lembar terealisasi 23.039 lembar, penjilidan target 25 buku terealisasi sebanyak 25 buku. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.643.480,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.548.920,- atau 99,35%.

4.5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan  
Dengan indikator kinerja Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan, target sebanyak 626 exemplar dan terealisasi sebanyak 626 exemplar dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.699.660,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.952.000,- atau 79,79%.

4.6. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu  
Dengan indikator kinerja Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu, target sebesar 15 laporan dan terealisasi sebesar 15 laporan dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.349.950,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.278.700,- atau 99,31%.

4.7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  
Dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, target sebanyak 45 laporan terealisasi sebanyak 45 laporan dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 213.008.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 211.028.294,- atau 99,07%.

## 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

### 5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

Dengan indikator kinerja Jumlah Paket Mebel yang Disediakan, target sebanyak 26 unit terealisasi sebanyak 26 unit dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 39.849.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 39.220.000,- atau 98,42%.

### 5.2. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Dengan indikator kinerja Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan, target sebanyak 5 unit terealisasi sebanyak 5 unit dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.642.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.600.000,- atau 99,83%.

## 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

### 6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Dengan indikator kinerja Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat, target sebanyak 1 laporan, terealisasi sebanyak 1 laporan dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.597.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.590.000,- atau 99,73%.

### 6.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Dengan indikator kinerja Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan, target sebanyak 12 laporan, terealisasi sebanyak 12 laporan dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 56.999.230,- dan terealisasi sebesar Rp. 46.365.456,- atau 81,34%.

### 6.3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Dengan indikator kinerja Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan, target sebanyak 12 laporan, terealisasi sebanyak 12 laporan dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 903.935.998,- dan terealisasi sebesar Rp. 876.007.724,- atau 96,91%.

## 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

### 7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Dengan indikator kinerja Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya, target sebanyak 1 unit, terealisasi sebanyak 1 unit dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 39.190.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 31.842.094,- atau 81,25%.

### 7.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Dengan indikator kinerja Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya, target sebanyak 18 unit, terealisasi sebanyak 18 unit dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 135.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 132.560.600,- atau 97,97%.

### 7.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Dengan indikator kinerja Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara, target sebanyak 26 unit , terealisasi sebanyak 26 unit dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.584.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 28.584.000,- atau 93,10%.

**b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan indikator kinerja yaitu Nilai Realisasi Investasi dengan target kinerja adalah sebanyak 220 milyar dan realisasi sebesar 493,81 milyar dengan capaian kinerja 224,45%, yang didukung oleh 1 (satu) kegiatan dengan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1.1. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Dengan indikator kinerja Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal target sebanyak 1 dokumen , terealisasi sebanyak 1 dokumen dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 37.365.380,- dan terealisasi sebesar Rp. 35.596.100,- atau 95,26%.

1.2. Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Dengan indikator kinerja Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah target sebanyak 1 kegiatan usaha , terealisasi sebanyak 1 kegiatan usaha dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 51.918.780,- dan terealisasi sebesar Rp. 44.827.200,- atau 86,34%.

2. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

Dengan indikator kinerja Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota, target sebanyak 1 dokumen , terealisasi sebanyak 1 dokumen dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 59.811.100,- atau 99,69%.

**c. Program Promosi Penanaman Modal**

Program Promosi Penanaman Modal dengan indikator kinerja yaitu Jumlah promosi investasi dengan target kinerja sebanyak 3 dokumen dan realisasi sebanyak 3 dokumen dengan capaian kinerja 100%, yang didukung oleh 1 (satu) kegiatan dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

Dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota, target sebanyak 3 dokumen , terealisasi sebanyak 3 dokumen dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 111.677.710,- dan terealisasi sebesar Rp. 90.105.350,- atau 80,68%.

**d. Program Pelayanan Penanaman Modal**

Program Pelayanan Penanaman Modal dengan indikator kinerja yaitu Persentase penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan sesuai SOP dengan target kinerja adalah sebesar 100% dan realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 100%, yang didukung oleh 1 (satu) kegiatan dengan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1.1. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Dengan indikator kinerja Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, target sebanyak 2.038 pelaku usaha , terealisasi sebanyak 2.038 pelaku usaha dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 186.864.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 178.124.530,- atau 95,32%.

1.2. Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

Dengan indikator kinerja Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal, target sebanyak 162 kegiatan usaha , terealisasi sebanyak 162 kegiatan usaha dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. 117.804.780,- dan terealisasi sebesar Rp. 115.446.110,- atau 98,00%.

- 1.3. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan  
Dengan indikator kinerja Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan, target sebanyak 21 orang , terealisasi sebanyak 21 orang dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 39.482.330,- dan terealisasi sebesar Rp. 29.089.060,- atau 73,68%.

**e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan indikator kinerja yaitu Persentase peluang investasi yang telah divalidasi dengan target kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 28% dan realisasi sebesar 28% dengan capaian kinerja 100%, yang didukung oleh 1 (satu) kegiatan dengan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
  - 1.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal  
Dengan indikator kinerja Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal, target sebanyak 8 kegiatan usaha, terealisasi sebanyak 8 kegiatan usaha dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 53.796.440,- dan terealisasi sebesar Rp. 46.022.500,- atau 85,55%.
  - 1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal  
Dengan indikator kinerja Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, target sebanyak 460 pelaku usaha, terealisasi sebanyak 460 pelaku usaha dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 267.033.920,- dan terealisasi sebesar Rp. 260.720.900,- atau 97,64%.
  - 1.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal  
Dengan indikator kinerja Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan, target sebanyak 17 kegiatan

usaha, terealisasi sebanyak 17 kegiatan usaha dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 59.369.560,- dan terealisasi sebesar Rp. 53.181.870,- atau 89,58%.

**f. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan indikator kinerja yaitu Persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan dengan target kinerja adalah sebesar 100% dan realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 100%, yang didukung oleh 1 (satu) kegiatan dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.1. Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Dengan indikator kinerja Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan, target sebanyak 1 dokumen, terealisasi sebanyak 1 dokumen dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.999.830,- dan terealisasi sebesar Rp. 48.889.840,- atau 97,78%.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2023 dan pencapaian Renstra DPMPSTP Kota Payakumbuh dapat dilihat dalam sebagaimana tabel berikut:



		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Laporan	650.038.241	-	-	12	186.606.608	3	28.205.000	6	29.992.000	9	53.509.000	12	73.597.000	12	185.303.000	12	185.303.000	28,51	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan kepegawaian	100	%	108.000.000	100	31.304.220	100	30.285.240	100	30.267.000				-		-	100	30.267.000	100	61.571.220	57,01	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	57	paket	108.000.000	57	31.304.220	57	30.285.240	57	30.267.000	-						100	30.267.000	100	61.571.220	57,01	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan kantor	100	%	280.000.000	100	505.335.910	80	322.529.330	20	26.861.118	40	87.899.323	80	90.274.582			103.682.361	80	308.717.384	80	814.053.294	290,73
		Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11	paket	25.000.000	11	21.680.050	11	14.999.500	-	-	-		6	6.289.120	11		11	6.289.120	11	27.969.170	111,88	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	6	paket	35.000.000	-	-	7	33.019.770	-	-	7	32.725.000					7	32.725.000	7	32.725.000	93,50	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	paket	5.000.000	4	69.138.400	-	-	-	-	-						-	-	-	69.138.400	-	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	11	paket	55.000.000	11	61.282.599	11	32.808.970	-	-	1	845.000	11	13.131.250	11	16.919.100	11	30.895.350	11	92.177.949	167,60	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	11	paket	25.000.000	11	31.666.870	4	14.643.480	-	-	2	3.555.000	2	3.689.550	4	7.304.370	4	14.548.920	4	46.215.790	184,86	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2	Dokumen	10.000.000	2	5.228.000	2	3.699.660	-	-	2	744.000	2	684.000	2	1.524.000	2	2.952.000	2	8.180.000	81,80	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	15	Laporan	15.000.000	13	12.213.900	15	10.349.950	-	-	-		10	5.653.500	15	4.625.200	15	10.278.700	15	22.492.600	149,95	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	60	Laporan	110.000.000	50	304.126.091	45	213.008.000	15	26.861.118	30	50.030.323	35	60.827.162	45	73.309.691	45	211.028.294	45	515.154.385	468,32	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	100	%	60.000.000	100	64.070.000	100	64.491.000	-	-	100	61.120.000		-			-	100	61.120.000	100	125.190.000	208,65
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	26	Unit	40.000.000	-	-	26	39.849.000	-	-	25	36.520.000					25	36.520.000	25	36.520.000	91,30	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	Unit	20.000.000	6	64.070.000	5	24.642.000	-	-	5	24.600.000					5	24.600.000	5	88.670.000	443,35	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa layanan kantor yang dibayarkan	100	%	3.271.600.000	100	1.977.448.537	100	963.532.228	55	167.811.124	55	155.108.289	80	313.203.220	288.830.547	80	924.953.180	80	2.902.401.717	88,72	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	10.000.000	1	4.066.000	1	2.597.000	1	1.290.000	1	1.290.000				1	2.580.000	1	6.646.000	66,46	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	228.000.000	12	75.977.077	12	56.999.230	3	10.860.022	6	2.976.827	9	20.367.896	12	12.160.711	12	46.365.456	12	122.342.533	53,66
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	3.033.600.000	12	1.897.405.460	12	903.935.998	3	155.661.102	6	150.841.462	9	292.835.324	12	276.669.836	12	876.007.724	12	2.773.413.184	91,42
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana gedung kantor yang terpelihara dengan baik	100	%	626.556.250	100	461.914.442	100	203.074.000	55	29.301.394	55	25.569.531	80	65.084.169	71.060.600	80	191.015.694	80	652.930.136	104,21	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	Unit	145.000.000	1	64.338.092	1	39.190.000	1	7.023.144	1	3.063.831	1	10.485.019	1	11.270.100	1	31.842.094	1	96.180.186	66,33
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18	Unit	381.556.250	18	267.992.950	18	135.300.000	17	22.278.250	17	22.505.700	17	47.236.150	17	40.540.500	17	132.560.600	17	400.553.550	104,98
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30	Unit	50.000.000	25	39.906.400	26	28.584.000	-	-	-	-	20	7.363.000	26	19.250.000	26	26.613.000	26	66.519.400	133,04
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor atau bangunan lainnya yang dilakukan	1	paket	50.000.000	1	89.677.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	89.677.000	179,35	
																		2.898.978.700	193	50.752.137.619		
Meningkatnya iklim usaha investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi	915	milyar	678.340.365	209,00	102.702.600	220	149.284.160	51,40	5.092.400	16.578.500	187.315.800	463.602.050	51,40	140.234.400	51,40	242.937.000	35,81			
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penetapan pemberian fasilitas/insentif yang diberikan	100	%	451.340.365	100,00	-	50%	89.284.160	10	3.153.400	20	10.706.500	30	17.417.800	65.549.600	30	80.423.300	20	80.423.300	17,82	

	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	dokumen	151.340.365	0	-	1	37.365.380	0	-	0	-	1	35.596.100	1	35.596.100	1	35.596.100	23,52		
	Evaluasi Pelaksanaan pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	10	kegiatan usaha	300.000.000	0	-	1	51.918.780	1	3.153.400	1	10.706.500	1	10.997.800	1	19.969.500	1	44.827.200	1	44.827.200	14,94
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase pembuatan peta potensi investasi yang telah divalidasi	25	%	227.000.000	25,00	102.702.600	25%	60.000.000	10,00	1.939.000	20,00	5.872.000	30	6.420.000	45.580.100	30	59.811.100	30	162.513.700	71,59	
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1	dokumen	100.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1	dokumen	127.000.000	1	102.702.600	1	60.000.000	0	1.939.000	0	5.872.000	0	6.420.000	1	45.580.100	1	59.811.100	1	162.513.700	127,96
	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Persentase peningkatan jumlah investor	10	%	247.214.678	209,00	-	220	111.677.710	2	1.226.000	2	7.357.500	5	151.047.520	346.223.180	5	90.105.350	5	90.105.350	36,45	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan promosi penanaman modal	25	%	247.214.678	100,00	-	50%	111.677.710	0	1.226.000	0	7.357.500	100	49.967.000	31.554.850	100	90.105.350	100	90.105.350	36,45	
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1	dokumen	100.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1	dokumen	147.214.678	0	-	2	111.677.710	0	1.226.000	0	7.357.500	2	49.967.000	3	31.554.850	3	90.105.350	3	90.105.350	61,21
	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Persentase penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan sesuai SOP	100	%	1.211.341.186	100	494.185.875	100	344.151.410	25	44.959.600	50	18.320.000	75	140.395.760	452.737.030	75	322.659.700	75	816.845.575	67,43	

		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen perizinan dan non perizinan yang sesuai dengan SOP	100	%	1.211.341.186	100	494.185.875	100	344.151.410	25	44.959.600	50	18.320.000	75	39.753.760	85.517.010	75	322.659.700	75	816.845.575	67,43	
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1500	pelaku usaha	886.341.186	1042	345.899.670	500	186.864.300	450	34.655.200	520	9.360.000	1.750	82.198.100	2.038	51.911.230	2.038	178.124.530	2.038	524.024.200	59,12
		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	500	kegiatan usaha	250.000.000	212	108.911.805	150	117.804.780	45	4.661.600	75	5.120.000	81	37.133.500	162	68.531.010	162	115.446.110	162	224.357.915	89,74
		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	50	dokumen	75.000.000	7	39.374.400	20	39.482.330	3	5.642.800	3	3.840.000	19	2.620.260	21	16.986.000	21	29.089.060	21	68.463.460	91,28
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase peluang investasi yang telah divalidasi	28	%	910.294.308	28	644.934.378	28	380.199.920	5	56.353.050	10	32.700.400	20	58.706.500	212.165.320	20	359.925.270	20	1.004.859.648	110,39	
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal	60	%	910.294.308	60	644.934.378	60	380.199.920	10	56.353.050	15	32.700.400	45	58.706.500	212.165.320	45	359.925.270	45	1.004.859.648	110,39	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	15	kegiatan usaha	160.294.308	9	106.592.060	8	53.796.440	3	9.730.000	3	6.506.500	6	14.895.500	8	14.890.500	8	46.022.500	8	152.614.560	95,21

		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	750	pelaku usaha	500.000.000	240	392.390.768	460	267.033.920	120	39.186.800	120	24.543.900	360	41.935.500	460	155.054.700	460	260.720.900	460	653.111.668	130,62
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	25	kegiatan usaha	250.000.000	15	145.951.550	17	59.369.560	3	7.436.250	3	1.650.000	11	1.875.500	17	42.220.120	17	53.181.870	17	199.133.420	79,65
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan Non perizinan</b> <b>Persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan Non perizinan</b>	100	%	184.911.009	100	74.309.860	100	49.999.830	25	5.101.880	35	5.848.750	50	2.962.000		34.977.210	50	48.889.840	35	123.199.700	66,63
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan	100	%	184.911.009	100	74.309.860	100	49.999.830	25	5.101.880	35	5.848.750	50	2.962.000		34.977.210	50	48.889.840	50	123.199.700	66,63
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1	dokumen	184.911.009	1	74.309.860	1	49.999.830	0	5.101.880	0	5.848.750	0	2.962.000		34.977.210	1	48.889.840	1	123.199.700	66,63

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Tahun 2023

Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yaitu koordinasi perumusan kebijakan dan menyelenggarakan pelayanan di bidang perizinan dan penanaman modal secara terpadu, dan fungsi perumusan kebijakan teknis dan penetapan pedoman, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan koordinasi, memfasilitasi investor dan administrasi serta evaluasi terhadap pelayanan di bidang perizinan dan penanaman modal sesuai dengan Perpres Nomor 27 tahun 2009 tentang PTSP, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memiliki tolok ukur pelayanan untuk menghasilkan mutu pelayanan prima yang terukur dengan indikator kecepatan, ketepatan, kesederhanaan, transparan dan kepastian hukum.

Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh untuk tahun 2023 berdasarkan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2023-2026 sebagai berikut :

### 1. Nilai Realisasi Investasi

Tahun 2023 Nilai Realisasi Investasi ditargetkan sebesar 220 milyar telah terealisasi sebesar 493,81 milyar dengan capaian indikator kinerja sebesar 224,45%

### 2. Hasil Penilaian AKIP DPM PTSP oleh Inspektorat

Untuk tahun 2023 nilai AKIP DPMPTSP ditargetkan A telah terealisasi dengan nilai A. dengan persentase capaian sebesar 100%.

Kesemua indikator ini dapat dicapai dengan adanya dukungan sumber daya yang dimiliki oleh DPMPTSP seperti :

- 1). Sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi yang handal dan sesuai.
- 2). Tempat, sarana dan prasarana kerja dan media informasi (IT),
- 3). Mekanisme kerja dalam bentuk petunjuk pelaksanaan kerja (SOP) di bidang penanaman modal dan perizinan yang jelas, mudah dipahami dan mudah diakses oleh perseorangan atau badan usaha,
- 4). Layanan pengaduan penanaman modal dan perizinan
- 5). Tersedianya Sistem Pelayanan dan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik.

Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2 :  
KINERJA PELAYANAN DPMPTSP KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023**

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	IKU	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian	Catatan Analisis
						2023	2024	2025	2026	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16
1	Nilai Realisasi Investasi		-	V	milyar	220	225	230	240	493,81	
2	Nilai AKIP DPMPTSP oleh Inspektorat			V	nilai	A	A	A	A	A	

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP**

Era globalisasi mengajak semua negara termasuk Indonesia untuk melakukan pembenahan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karenanya dalam menghadapi perekonomian global, dirasa perlu menyesuaikan peraturan – peraturan yang ada di bidang penanaman modal dan bidang perizinan dengan maksud menciptakan iklim pemasaran modal yang kondusif, promotif, memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha. Atas dasar hal tersebut maka diterbitkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Permendagri nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Presiden RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu .

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut maka penyelesaikan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kota Payakumbuh sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah untuk membangun perekonomian masyarakat dibidang Penanaman Modal dan bidang Perizinan, dimana pertumbuhan ekonomi masyarakat merupakan salah satu sasaran RPD Kota Payakumbuh. Berdasarkan kondisi yang ada, maka dalam pelayanan Penanaman Modal dan pelayanan perizinan, terdapat sejumlah permasalahan yang tertuang di dalam Renstra DPMPTSP Kota Payakumbuh yang memerlukan upaya penanganan dalam jangka waktu 5 Tahun kedepan yang dilakukan secara bertahap melalui program kegiatan yang dijabarkan melalui Renja DPMPTSP yaitu :

1. Masih kurangnya promosi dan kerjasama investasi di Kota payakumbuh
2. Masih kurangnya iklim investasi di Kota Payakumbuh
3. Masih kurangnya ketaatan terhadap prosedur pelayanan

#### **Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan DPMPTSP**

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang perlu dilakukan analisa SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) di analisa dengan faktor faktor kunci dari Kekuatan, Kelemahan, Tantangan dan Kendala yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan misi OPD secara efektif dan efisien.

### ***Kekuatan (strengths)***

Kekuatan yang kami gunakan dalam menganalisis lingkungan internal adalah:

1. Tersedianya regulasi tentang Penanaman Modal (berupa Perwako dan Perda).
2. Penggunaan teknologi informasi untuk mempromosikan peluang investasi Kota Payakumbuh
3. Dengan adanya perda Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tersedianya Legalitas formal keberadaan DPMPSTP).
4. Dukungan dari sumber daya manusia dan personil lainnya yang profesional
5. Tersedianya Sarana dan prasarana perizinan yang memadai.

### ***Kelemahan (Weaknesses)***

Kelemahan yang dirasakan adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kepastian hukum tentang peluang investasi Kota Payakumbuh seperti status tanah dll.
2. Masih kurangnya studi kelayakan tentang peluang investasi.

Lingkungan eksternal yang memberikan pengaruh dalam penyusunan rencana strategis ini adalah sebagai berikut:

### ***Peluang (Opportunities)***

1. Tersedianya event-event/pameran tempat mempromosikan peluang investasi Kota Payakumbuh.
2. Memberikan pelayanan perizinan prima ke masyarakat melalui website.
3. Proses penanaman modal dan penyelesaian pelayanan perizinan semakin jelas.
4. Terbukanya kesempatan investasi karena kemudahan proses dan transparansi prosedurnya.
5. Adanya peraturan daerah yang mengakomodir penanaman modal dan perizinan.

### ***Ancaman (Threats)***

Kurangnya dukungan instansi teknis dalam berkoordinasi dan bersinkronisasi dalam pelayanan administrasi perizinan

1. Masih sulitnya melakukan pengawasan terhadap investor yang sudah ada
2. Ketidak disiplin masyarakat yang telah mempunyai izin
3. Persaingan antar daerah mengenai peluang investasi.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan dalam menjalankan usahanya

## **Strategi Analisa Strength, Weaknesses, Opportunities dan Threats (SWOT)**

Dari analisis internal dan eksternal di atas, strategi swot yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi kekuatan untuk memanfaatkan peluang
2. Peningkatkan koordinasi dengan instansi teknis terkait
3. Mempercepat proses investasi dan pelayanan perizinan
4. Meningkatkan transparansi proses investasi dan pelayanan perizinan
5. Melakukan sosialisasi investasi dan izin-izin lanjutan yang telah mempunyai payung hukum.

Disamping hal tersebut, strategi mengoptimalkan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman, melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Menyederhanakan persyaratan dan regulasi investasi dan pelayanan perizinan
2. Membuat laporan secara reguler/berkala perkembangan investasi dan pelayanan perizinan di DPMPTSP Kota Payakumbuh.
3. Melakukan konsolidasi mekanisme pelayanan dengan instansi teknis
4. Menyiapkan dokumen terkait mengenai pelayan perizinan

Strategi memanfaatkan peluang untuk mengurangi kelemahan, dapat kita rinci sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi teknis terkait.
2. Meningkatkan kemampuan personil dalam investasi serta memberikan pelayanan perizinan (sikap/perilaku)
3. Menginfentarisir seluruh jenis perizinan sesuai dengan kewenangan instansi teknis terkait
4. Membuat Standar Operasional Prosedur pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku
5. Melengkapi pelayanan dengan teknologi informatika.

Sedangkan Strategi mengurangi kelemahan (weaknesses) untuk mencegah dan mengatasi ancaman (Threats), terlihat dengan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang efektif.
2. Penyederhanan persyaratan dan mekanisme investasi dan pelayanan perizinan.
3. Melakukan konsolidasi mekanisme investasi dan pelayanan perizinan kepada instansi teknis.
4. Mempercepat pelayanan dengan menerapkan teknologi informatika.

#### **2.4 Reviu Terhadap Rancangan Akhir RKPD**

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja DPMPTSP Kota Payakumbuh Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2025**  
**KOTA PAYAKUMBUH**

No	Rancangan Akhkir RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									4.543.685.195	
2.18.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									4.543.685.195	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Payakumbuh	IKM	98,03	4.188.691.655	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Payakumbuh	IKM	98,03	4.188.691.655	
			Nilai evaluasi AKIP DPMPSTP oleh Inspektorat	A				Nilai evaluasi AKIP DPMPSTP oleh Inspektorat	A		
1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelayanan publik	100%	20.022.400	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelayanan publik	100%	20.022.400	
1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	10.022.400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	10.022.400	
1.2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 dokumen	10.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 dokumen	10.000.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase capaian realisasi keuangan	100%	2.890.874.975	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase capaian realisasi keuangan	100%	2.890.874.975	

2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	22 orang/bulan	2.752.490.975	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	22 orang/bulan	2.752.490.975
2.2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 laporan	138.384.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 laporan	138.384.000
3	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase terpenuhinya kebutuhan kepegawaian</b>	<b>100%</b>	<b>57.257.300</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase terpenuhinya kebutuhan kepegawaian</b>	<b>100%</b>	<b>57.257.300</b>
3.1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	51 paket	32.257.500	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	51 paket	32.257.500
3.2.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35 orang	24.999.800	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35 orang	24.999.800
4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase terpenuhinya kebutuhan kantor</b>	<b>80%</b>	<b>144.892.200</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase terpenuhinya kebutuhan kantor</b>	<b>80%</b>	<b>144.892.200</b>
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 paket	7.999.150	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 paket	7.999.150
4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	6 paket	29.999.950	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	6 paket	29.999.950

4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	11 paket	10.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	11 paket	10.000.000
4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 dokumen	3.339.600	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 dokumen	3.339.600
4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	15 laporan	3.553.500	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	15 laporan	3.553.500
4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 laporan	90.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 laporan	90.000.000
5	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase jasa layanan kantor yang dibayarkan</b>	<b>100%</b>	<b>824.014.780</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase jasa layanan kantor yang dibayarkan</b>	<b>100%</b>	<b>824.014.780</b>
5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	49.999.984	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	49.999.984
5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	774.014.796	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	774.014.796
6	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang</b>		<b>Persentase sarana gedung kantor yang terpelihara dengan baik</b>	<b>100%</b>	<b>251.630.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang</b>		<b>Persentase sarana gedung kantor yang terpelihara dengan baik</b>	<b>100%</b>	<b>251.630.000</b>

6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	39.190.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	39.190.000
6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 unit	166.200.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 unit	166.200.000
6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	20 unit	18.740.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	20 unit	18.740.000
6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	27.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	27.500.000
II	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Payakumbuh	<b>Nilai Realisasi Investasi</b>	<b>230 milyar</b>	<b>49.999.850</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Payakumbuh	<b>Nilai Realisasi Investasi</b>	<b>230 milyar</b>	<b>49.999.850</b>
1	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase pembuatan peta potensi investasi yang telah divalidasi</b>	<b>25%</b>	<b>49.999.850</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase pembuatan peta potensi investasi yang telah divalidasi</b>	<b>25%</b>	<b>49.999.850</b>

1.1	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	49.999.850	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	49.999.850	
III	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Payakumbuh	<b>Persentase peningkatan jumlah investor</b>	<b>10%</b>	<b>39.999.770</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Payakumbuh	<b>Persentase peningkatan jumlah investor</b>	<b>10%</b>	<b>39.999.770</b>	
1	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase penyelenggaraan promosi penanaman modal</b>	<b>10%</b>	<b>39.999.770</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase penyelenggaraan promosi penanaman modal</b>	<b>10%</b>	<b>39.999.770</b>	
1.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	39.999.770	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	39.999.770	
IV	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Payakumbuh	<b>Persentase penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan sesuai SOP</b>	<b>100%</b>	<b>209.994.500</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Payakumbuh	<b>Persentase penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan sesuai SOP</b>	<b>100%</b>	<b>209.994.500</b>	

1	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>		<b>Persentase dokumen perizinan dan non perizinan yang sesuai dengan SOP</b>		<b>209.994.500</b>	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>		<b>Persentase dokumen perizinan dan non perizinan yang sesuai dengan SOP</b>		<b>209.994.500</b>
1.1.	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000 Pelaku Usaha	160.000.000	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000 Pelaku Usaha	160.000.000
1.2.	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko		Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	20 pelaku usaha	19.996.600	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko		Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	20 pelaku usaha	19.996.600

1.3	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko		Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	150 kegiatan usaha	29.997.900	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko		Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	150 kegiatan usaha	29.997.900
IV	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Payakumbuh	<b>Persentase peluang investasi yang telah divalidasi</b>	<b>28%</b>	<b>24.999.420</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Payakumbuh	<b>Persentase peluang investasi yang telah divalidasi</b>	<b>28%</b>	<b>24.999.420</b>
1	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase perusahaan yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal</b>		<b>24.999.420</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase perusahaan yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal</b>		<b>24.999.420</b>
1.1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	7 Kegiatan usaha	4.999.750	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	7 Kegiatan usaha	4.999.750
1.2	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	250 Pelaku Usaha	15.000.050	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	250 Pelaku Usaha	15.000.050

			dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko					dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			
1.3	Pengawasan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	13 Kegiatan Usaha	4.999.620	Pengawasan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	13 Kegiatan Usaha	4.999.620	
v	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Payakumbuh	<b>Persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan Non perizinan</b>	<b>100%</b>	<b>30.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Payakumbuh	<b>Persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan Non perizinan</b>	<b>100%</b>	<b>30.000.000</b>	
1	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase capaian ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan</b>		<b>30.000.000</b>	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase capaian ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan</b>		<b>30.000.000</b>	

1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 dokumen	30.000.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 dokumen	30.000.000	
-----	--	--	--	-----------	------------	--	--	--	-----------	------------	--

## **2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan masyarakat**

Perencanaan pembangunan daerah Kota Payakumbuh beraskan lima prinsip yaitu perencanaan politik, perencanaan teknokratik, perencanaan partisipatif, perencanaan top down dan perencanaan bottom up.

Musrenbang Kota Payakumbuh Tahun 2025 merupakan bagian dari perencanaan partisipatif, perencanaan top down dan perencanaan bottom up yang dimulai dari musrenbang tingkat kelurahan, tingkat kecamatan sampai ke tingkat kota.

Untuk Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 DPMPTSP Kota Payakumbuh telah menetapkan program/kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sementara program/kegiatan yang berasal dari usulan masyarakat yang tertuang dalam musrenbang kecamatan tidak ada yang ditujukan untuk DPMPTSP Kota Payakumbuh.

Hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dituangkan dalam usulan program dan kegiatan masyarakat tersebut sebagaimana tabel sebagai berikut.

TABEL : 4.a.

PERSANDINGAN DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS HASIL MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2024 DENGAN RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

No	Hasil Musrenbang Kecamatan tahun 2024				Kegiatan sesuai Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		
	Kegiatan Prioritas	Lokasi (kelurahan)	Indikator Kinerja	Volume	Kegiatan/ Sub keg Rancangan Renja Tahun 2025	Pagu Indikatif Tahun 2025	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>NIHIL</b>							

**Tabel 4.b :**  
**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP**

#### **3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional**

Untuk tahun 2025 DPMPTSP tidak ada mengusulkan/melaksanakan program atau kegiatan baik dari APBN maupun APBD Provinsi.

#### **3.2 Tujuan dan sasaran Renja DPMPTSP**

##### **Tujuan**

Tujuan dilaksanakannya Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Payakumbuh tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Terwujudnya peningkatan investasi di Kota Payakumbuh

##### **Sasaran**

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Payakumbuh Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya Nilai Investasi di Kota Payakumbuh

#### **3.3. Program dan Kegiatan**

Rencana program dan kegiatan, yang merupakan perwujudan visi dan misi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maupun visi dan misi Kepala Daerah, dalam meningkatkan tumbuh dan berkembangnya investasi di Kota Payakumbuh.

Strategi pembangunan pada DPMPTSP Kota Payakumbuh sesuai dengan kewenangan adalah:

1. Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi di Kota Payakumbuh
2. Meningkatkan iklim investasi di Kota Payakumbuh
3. Mendorong kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan kemudahan dan kenyamanan berinvestasi

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran DPMPTSP Kota Payakumbuh tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026  
KOTA PAYAKUMBUH**

**PERANGKAT DAERAH : DPMPTSP**

No	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (RP)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota</b>	<b>IKM</b>	Payakumbuh	<b>98,03</b>	<b>4.188.691.655</b>	<b>DAU</b>		<b>99,03</b>	<b>4.138.949.167</b>
		<b>Nilai evaluasi AKIP DPMPTSP oleh Inspektorat</b>		<b>A</b>		<b>A</b>			
1	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelayanan publik</b>		<b>100%</b>	<b>20.022.400</b>			<b>100%</b>	<b>23.920.000</b>
1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		3 dokumen	10.022.400			3 dokumen	12.625.000
1.2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah		4 dokumen	10.000.000			4 dokumen	11.295.000
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase capaian realisasi keuangan</b>		<b>100%</b>	<b>2.890.874.975</b>			<b>100%</b>	<b>2.916.863.307</b>
2.1.	Penyediaan Gaji dan	Jumlah orang yang		22 orang/bulan	2.752.490.975			22 orang/bulan	2.752.490.975

	Tunjangan ASN	menerima gaji dan tunjangan ASN							
2.2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 laporan	138.384.000			12 laporan	164.372.332
3	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya kebutuhan kepegawaian</b>		<b>100%</b>	<b>57.257.300</b>			<b>100%</b>	<b>57.257.300</b>
3.1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		51 paket	32.257.500			51 paket	32.257.500
3.2.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		35 orang	24.999.800			35 orang	24.999.800
4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya kebutuhan kantor</b>		<b>80%</b>	<b>144.892.200</b>			<b>80%</b>	<b>150.021.080</b>
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		11 paket	7.999.150			11 paket	10.000.000
4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		6 paket	29.999.950			6 paket	30.000.000
4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		11 paket	10.000.000			11 paket	10.000.000

4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		3 dokumen	3.339.600			3 dokumen	3.000.000
4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu		15 laporan	3.553.500			15 laporan	7.021.080
4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		40 laporan	90.000.000			40 laporan	90.000.000
5	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase jasa layanan kantor yang dibayarkan</b>		<b>100%</b>	<b>824.014.780</b>			<b>100%</b>	<b>824.014.780</b>
5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		12 laporan	49.999.984			12 laporan	49.999.984
5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		12 laporan	774.014.796			12 laporan	774.014.796
6	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang</b>	<b>Persentase sarana gedung kantor yang terpelihara dengan baik</b>		<b>100%</b>	<b>251.630.000</b>			<b>100%</b>	<b>224.130.000</b>
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 unit	39.190.000			1 unit	39.190.000

6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		18 unit	166.200.000			18 unit	166.200.000
6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		10 unit	18.740.000			10 unit	18.740.000
6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 unit	27.500.000			1 unit	27.500.000
II	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Nilai Realisasi Investasi</b>		<b>230 milyar</b>	<b>49.999.850</b>	<b>DAU</b>		<b>225 milyar</b>	<b>49.999.850</b>
I	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pembuatan peta potensi investasi yang telah divalidasi</b>		<b>25%</b>	<b>49.999.850</b>			<b>25%</b>	<b>49.999.850</b>
1.1	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		1 Dokumen	49.999.850			1 Dokumen	49.999.850
III	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase peningkatan jumlah investor</b>		<b>10%</b>	<b>39.999.770</b>	<b>DAU</b>		<b>10%</b>	<b>49.999.850</b>

1	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase penyelenggaraan promosi penanaman modal</b>		<b>10%</b>	<b>39.999.770</b>			<b>10%</b>	<b>49.999.850</b>
1.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota		1 Dokumen	39.999.770			1 Dokumen	49.999.850
IV	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan sesuai SOP</b>		<b>100%</b>	<b>209.994.500</b>	<b>DAU</b>		<b>100%</b>	<b>280.100.000</b>
1	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase dokumen perizinan dan non perizinan yang sesuai dengan SOP</b>		<b>100%</b>	<b>209.994.500</b>			<b>100%</b>	<b>280.100.000</b>

1.1.	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		1000 Pelaku Usaha	160.000.000			300 Pelaku Usaha	180.000.000
1.2.	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Payakumbuh	20 pelaku usaha	19.996.600			150 kegiatan usaha	50.100.000
1.3	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha		150 kegiatan usaha	29.997.900				50.000.000
V	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase peluang investasi yang telah divalidasi</b>		<b>28%</b>	<b>24.999.420</b>	<b>DAU dan DAK NF FPM</b>		<b>28%</b>	<b>24.999.420</b>

1	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase perusahaan yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal</b>		<b>60%</b>	<b>24.999.420</b>			<b>60%</b>	<b>24.999.420</b>
1.1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		7 Kegiatan usaha	4.999.750			7 Kegiatan usaha	4.999.750
1.2	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		250 Pelaku Usaha	15.000.050			250 Pelaku Usaha	15.000.050

1.3	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha		13 Kegiatan Usaha	4.999.620			13 Kegiatan Usaha	4.999.620
V	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan Non perizinan</b>		100%	30.000.000	DAU		100%	40.000.000
1	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase capaian ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan</b>	Payakumbuh		30.000.000				40.000.000
1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan		1 dokumen	30.000.000			1 dokumen	40.000.000

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Usulan rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan DPMPSTSP Kota Payakumbuh untuk tahun 2025 yang terdiri dari 6 program, 11 kegiatan dan 27 sub kegiatan. Dengan jumlah anggaran sebesar RP. 4.543.685.195,- terdiri dari :

#### 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

##### 1). Kegiatan : Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

##### 2). Kegiatan : Administrasi Keuangan

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

##### 3). Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

##### 4).. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5. Fasilitas Kunjungan Tamu
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

##### 4). Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5). Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

1). Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

III. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

1). Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

IV. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

1). Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2. Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
3. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko

V. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

1). Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya.
2. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha.
3. Pengawasan Penanaman Modal.

#### VI. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

- 1). Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Berdasarkan uraian diatas, rencana kerja dan kegiatan prioritas DPMPTSP Kota Payakumbuh tahun 2025, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANG KAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						4.562.685.195							5.412.911.788		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.562.685.195							5.412.911.788		
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						4.562.685.195							5.412.911.788		
1,	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM DPMPPTSP Nilai Evaluasi AKIP DPMPPTSP oleh Inspektorat	-			98,03 Indeks A kategori	4.207.725.845						-	4.432.911.788		
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelayanan publik	-			100 %	20.022.150			-	-	ASN DPMPPTSP	-	36.499.850	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	10.022.300	Kota Payakum buh, Payakum buh Utara, Kotokoci ak Kubu Tapakraj o	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DPMPPTSP		21.499.850	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				4 Laporan	9.999.850	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DPMPPTSP		15.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase capaian realisasi keuangan</i>	-			100 %	2.891.245.236			-	-	ASN DPMPPTSP	-	2.890.801.856	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				22 Orang/bulan	2.752.861.236	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DPMPPTSP		2.720.801.856	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				12 Dokumen	138.384.000	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DPMPPTSP		170.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan kepegawaian	-			100 %	75.999.500			-	-	ASN DPMPPTSP	-	110.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				50 Paket	51.000.000	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakraj	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DPMPPTSP		30.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				35 Orang	24.999.500	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakraj	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DPMPPTSP		80.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan kantor	-			80 %	143.234.200			-	-	ASN DPMPPTSP	-	250.700.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				11 Paket	8.000.000	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DPMPPTSP		15.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

									Tapakraj o							
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				6 Paket	29.998.500	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DPMPPTSP		40.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				11 Paket	9.999.750	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DPMPPTSP		15.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				2 Dokumen	3.337.950	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DPMPPTSP		3.700.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				15 Laporan	3.548.000	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DPMPPTSP		3.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				40 Laporan	88.350.000	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DPMPPTSP		174.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase jasa layanan kantor yang dibayarkan</i>	-			100 %	824.014.759			-	-	ASN DPMPPTSP	-	809.520.082	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	49.999.984	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DPMPPTSP		60.999.570	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	774.014.775	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DPMPPTSP		748.520.512	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase sarana gedung kantor yang terpelihara dengan baik</i>	-			100 %	253.210.000			-	-	ASN DPMPPTSP	-	335.390.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	42.950.000	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DPMPPTSP		39.190.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				17 Unit	164.020.000	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DPMPPTSP		166.200.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				20 Unit	18.740.000	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DPMPPTSP		30.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	27.500.000	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DPMPPTSP		100.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2,	2.18.02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<i>Nilai realisasi investasi</i>	-			230 Milyar	49.999.850						-	100.000.000	

	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	<i>Persentase pembuatan peta potensi investasi yang telah divalidasi</i>	-			25 %	49.999.850			-	-	Pelaku Usaha	-	100.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	49.999.850	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pelaku Usaha		100.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3,	<b>2.18.03</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<i>Persentase peningkatan jumlah investor</i>	-			10 %	39.999.750						-	100.000.000	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase penyelenggaraan promosi penanaman modal</i>	-			25 %	39.999.750			-	-	Pelaku Usaha	-	100.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	39.999.750	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pelaku Usaha		100.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4,	<b>2.18.04</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<i>Persentase penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan sesuai SOP</i>	-			100 %	209.960.850						-	300.000.000	

2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Persentase dokumen perizinan dan non perizinan yang sesuai dengan SOP</i>	-			100 %	209.960.850			-	-	Pelaku Usaha	-	300.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
		<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>				1000 Pelaku Usaha	159.966.350	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pelaku Usaha		200.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko														
		<i>Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>				20 Pelaku Usaha	19.996.500	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pelaku Usaha		40.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko														
		<i>Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kot</i>				100 Kegiatan Usaha	29.998.000	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pelaku Usaha		60.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

			<i>a bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha</i>														
5,	2.18.05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<i>Persentase peluang investasi yang telah divalidasi</i>	-			28 %	24.999.150					-	400.000.000			
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase perusahaan yang menyampaikan Laporan kegiatan Penanaman Modal</i>	-			60 %	24.999.150				-	-	Pelaku Usaha	-	400.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya															
			<i>Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya</i>				7 Kegiatan Usaha.	4.999.700	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakraj	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	-	Pelaku Usaha		100.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha															
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</i>				250 Pelaku Usaha	15.000.000	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakraj	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	-	Pelaku Usaha		200.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal															

			<i>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha</i>				13 Kegiatan Usaha	4.999.450	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	-	Pelaku Usaha		100.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
6,	2.18.06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<i>Persentase ketersediaan data perizinan dan non perizinan</i>	-			100 %	29.999.750						-	80.000.000		
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase capaian ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan</i>	-			100 %	29.999.750			-	-	Pelaku Usaha	-	80.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik															
			<i>Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan</i>				1 Dokumen	29.999.750	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pelaku Usaha		80.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	<b>J U M L A H</b>							<b>4.562.685.195</b>								<b>5.412.911.788</b>	

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Payakumbuh Tahun 2025 merupakan suatu dokumen yang akan dijadikan acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kota Payakumbuh, yang pada akhirnya diharapkan dapat menunjang tercapainya visi Kota Payakumbuh

Dengan adanya dokumen Renja ini, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Renja DPMPTSP Kota Payakumbuh tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan.
- b. Seluruh stake holder di lingkup DPMPTSP Kota Payakumbuh berkewajiban dalam penyusunan RKA DPMPTSP tahun 2025 berpedoman pada Renja DPMPTSP tahun 2025
- c. Program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen ini merupakan program dan kegiatan DPMPTSP yang bersifat indikatif. Sedangkan rumusan program/kegiatan DPMPTSP di dalam Renja harus mengacu pada Permendagri Nomor: 90 Tahun 2019.

#### **Rencana Tindak Lanjut**

Dalam mewujudkan misi Kepala Daerah yaitu: Membangun perekonomian yang tangguh, unggul, berdaya saing dan berkeadilan dengan berbasis ekonomi kerakyatan dengan memunculkan gerakan ekonomi bersama serta Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Berkomitmen untuk meningkatkan sistim dan prosedur pelayanan di bidang perizinan dan bidang penanaman modal kearah yang lebih baik .

Demikianlah Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kota Payakumbuh tahun 2025 ini dibuat untuk dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan kinerja kedepannya.

Payakumbuh, 1 April 2024



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PAYAKUMBUH

**MEIZON SATRIA, ST, M.Si**

NIP. 19710503 200312 1 006

